

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil adalah kegiatan yang dikerjakan di rumah – rumah penduduk, yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat diartikan juga sebagai usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan (Tulus T.H Tambunan, 2001).

Ciri – ciri yang dapat digunakan untuk sebagai ukuran apakah usaha itu tergolong kecil adalah (Wibowo, 1994) :

1. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum.
2. Usaha yang dikelola oleh satu orang.
3. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi.
4. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya.

Ciri– ciri pada batasan perusahaan kecil adalah :

1. Perusahaan yang memiliki modal tidak lebih dari delapan puluh juta rupiah.
2. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi atau industri atau jasa konstruksi yang memiliki modal tidak lebih dari dua ratus juta rupiah.

Seperti Usaha Kecil ini diantaranya: kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas

kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Industri ada 3 jenis yaitu primer, sekunder dan tersier. Yang pertama, industri primer adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Yang kedua, industri sekunder yaitu industri yang bahan mentah yang diolah kembali. Dan yang ketiga, industri tersier adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa (Godam, 2006).

Beberapa keunggulan yang di miliki Industri kecil dibandingkan dengan industri besar, di antaranya adalah (Partomo, 2002):

1. Inovasi dengan teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapan terhadap tenaga kerja.
4. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

2.1.1.1. Peranan Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) mempunyai peran yang

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak industri yang berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah di hadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta di fokuskan pada IKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.

Pengembangan Industri Kecil Menengah perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Industri Kecil Menengah. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan IKM ini disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Ekonomi Nasional (Propenas) menyebutkan bahwa dalam jangka menengah kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan utilitas kapasitas produksi industri. Peningkatan utilitas kapasitas produksi industri adalah kebijakan pembangunan industri yang mengacu pada pemanfaatan peluang pasar dalam dan luar negeri berdasarkan potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kebijakan industri diarahkan pada peningkatan utilitas kapasitas produksi, efisiensi dan daya saing industri.

2. Pengembangan usaha kecil menengah, kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah diarahkan pada pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang antara lain mencakup :

a. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM – Industri dagang yang menggunakan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam dan industri pendukungnya untuk pasar dalam dan luar negeri seperti argoindustri, kerajinan, keramik, dan gerabah.

b. Memberikan peluang yang lebih besar kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UKM dalam pemulihan ekonomi nasional harus segera di implementasikan secara nyata dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran, karena industri kecil ini dapat berfungsi sebagai :

(1)Pertama, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional; (2)Kedua, meningkatkan peluang kesempatan kerja; (3)Ketiga, pemerataan pendapatan; (4)Keempat, mengurangi perbedaan kemakmuran antar daerah; dan (5)Kelima, struktur perekonomian yang berimbang (Iryadini Lisnawati, 2010).

Pemerintah daerah sudah mengetahui sejak awal peran IKM dalam perekonomian daerah masing-masing. Tantangan yang dihadapi setiap daerah adalah penyiapan lapangan kerja karena penambahan angkatan kerja begitu pesat. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pengangguran yang cukup tinggi di hampir semua daerah. Peranan IKM dirasakan begitu penting karena sektor ini tidak hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga menyediakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dengan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang rendah.

IKM dasarnya dapat melakukan transaksi dengan pelaku ekonomi baik sesama IKM, usaha besar dan dapat menggalang kerjasama Internasional. Pada saat yang sama IKM memberi kontribusi terhadap ekspor suatu Negara. Dalam hal ini

IKM berperan sebagai distributor sekaligus pangsa bagi berbagai produk yang dihasilkan usaha besar.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana peran IKM sangat dominan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga dapat memacu pada arah menuju IKM yang lebih baik dalam hal ekonomi dan pemberdayaannya. IKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar “hampir semua usaha besar berawal dari IKM”. IKM harus terus ditingkatkan dan aktif agar tetap maju dan bersaing dengan perusahaan besar.

IKM juga didukung oleh sektor perbankan yang sangat penting terutama dalam hal pendanaan seperti peminjaman. Khususnya dalam hal modal apalagi merupakan pemacu supaya IKM dapat menambah peluang lebih bagus. Ada juga 3 hal masalah yang membuat IKM jadi pembicaraan di seminar, yaitu pasar, modal dan teknologi. Dan terdapat juga hal yang harus di perhatikan dalam pengembangan IKM yaitu: kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembicaraan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM.

Terdapat ciri-ciri dari perusahaan kecil dan menengah secara umum, sebagai berikut:

1. Manajemennya berdiri sendiri, dalam arti pemilik adalah sekaligus pengelola dalam IKM.
2. Modal di sediakan oleh seorang pemilik modal.
3. Operasi IKM juga memiliki orientasi dari luar dan dalam negeri.
4. Ukuran perusahaan kecil menengah tidak juga memiliki kekuatan maupun kelemahan dalam hal ekonomi.

Selain ciri-ciri tersebut, terdapat kekuatan dan kelemahan dalam IKM, yaitu:

KEKUATAN:

1. Kebebasan untuk bertindak.
2. Menyesuaikan kepada kebutuhan setempat.
3. Ikut peran serta dalam melakukan usaha atau tindakan.

KELEMAHAN:

1. Modal dalam pengembangan terbatas.
2. Sulit untuk mendapatkan karyawan.
3. Relatif lemah dalam hal spesialis dalam pengembangan.

Dan salah satu langkah strategis untuk mengamankan IKM dari ancaman dan tantangan krisis global adalah dengan melakukan penguatan pada multi aspek. Beberapa kewirausahaan dalam mengatasi tantangan di IKM adalah: Memiliki daya pikir kreatif, bertindak inovatif, berani mengambil resiko dan menyesuaikan profil resiko serta mengetahui resiko dan manfaat dari suatu bisnis.

2.1.2. Jumlah Unit Usaha

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk tujuan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan upaya) untuk mencapai sesuatu.

Usaha kecil, menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta (enam ratus juta) tidak termasuk tanah dan rumah yang

ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600 juta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) unit usaha adalah adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Azis Prabowo, 1997).

2.1.3. Investasi

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001:284). Investasi juga dapat di definisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Supriyono, 1987:424). Investasi dapat pula di definisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003:2).

Investasi bisa disebut juga penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena di samping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat (Makmun dan Yasin, 2003).

Menurut Sadono Sukirno (2003), investasi dapat di artikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi dalam perspektif makro investasi adalah tindakan dari sektor perusahaan dalam membeli barang-barang modal dan bukan dalam perspektif individu dalam membeli barang-barang modal. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang.

Di dalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi di definisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Pembangunan regional, penanaman modal atau investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Dalam perekonomian makro kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut akan membawa peningkatan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan akan tenaga kerja untuk proses produksi, yang artinya peningkatan dalam kesempatan kerja. Melainkan dari menurut pendapat Suparmoko (1994), investasi adalah pengeluaran untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal (Capital Stock). Persediaan modal ini diantaranya seperti peralatan, mesin-mesin, pabrik dan persediaan bahan baku yang bisa dipakai untuk proses produksi. Jadi investasi adalah pengeluaran yang untuk menambah modal.

2.1.3.1. Fungsi dan Tujuan Investasi

Fungsi investasi yang pertama sebagai suatu pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan (Sudono,2000). Dan Fungsi Investasi yang kedua yaitu kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional.

Investasi juga memiliki sebuah tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain sebagainya.
2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial.
3. Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas suatu perusahaan tersebut.
4. Untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang di hasilkan.
5. Untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis.
6. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.

2.1.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laju Investasi

Laju investasi yang ditanam disuatu negara atau daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengaruh Nilai Tukar

Secara teoritis dampak perubahan tingkat atau nilai tukar dengan investasi bersifat *uncertainty* (tidak pasti). Shikawa (1994), mengatakan pengaruh tingkat kurs yang berubah pada investasi dapat langsung lewat beberapa saluran, perubahan kurs tersebut akan berpengaruh pada dua saluran, sisi permintaan dan sisi penawaran domestik. Dalam jangka pendek, penurunan tingkat nilai tukar akan mengurangi investasi melalui pengaruh negatifnya pada absorpsi domestik atau yang dikenal dengan *expenditure reducing effect*.

Karena penurunan tingkat kurs ini akan menyebabkan nilai riil aset masyarakat yang di sebabkan kenaikan tingkat harga-harga secara umum dan selanjutnya akan menurunkan permintaan domestik masyarakat. Gejala diatas pada tingkat perusahaan akan direspon dengan penurunan pada pengeluaran / alokasi modal pada investasi. Pada sisi penawaran, pengaruh aspek pengalihan pengeluaran (*expenditure switching*) akan perubahan tingkat kurs pada investasi relatif tidak menentu. Penurunan nilai tukar mata uang domestik akan menaikkan produk-produk impor yang di ukur dengan mata uang domestik dan dengan demikian akan meningkatkan harga barang-barang yang di perdagangan / barang-barang ekspor (*traded goods*) relatif terhadap barang-barang yang tidak di perdagangan (*non traded goods*), sehingga di dapatkan kenyataan nilai tukar mata uang domestik akan mendorong ekspansi investasi pada barang-barang perdagangan tersebut.

2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga

Tingkat bunga mempunyai pengaruh yang signifikan pada dorongan untuk berinvestasi. Pada kegiatan produksi, pengolahan barang-barang modal atau bahan baku produksi memerlukan modal (input) lain untuk menghasilkan output / barang final.

3. Pengaruh Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi berpengaruh negatif pada tingkat investasi hal ini di sebabkan karena

tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan resiko proyek-proyek investasi dan dalam jangka panjang inflasi yang tinggi dapat mengurangi rata-rata masa jatuh pinjam modal serta menimbulkan distorsi informasi tentang harga-harga relatif. Di Indonesia kenaikan tingkat inflasi yang cukup besar biasanya akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga perbankan. Dapat dipahami, dalam upayanya menurunkan tingkat inflasi yang membumbung, pemerintah sering menggunakan kebijakan moneter uang ketat (*tigh money policy*). Dengan demikian tingkat inflasi domestik juga berpengaruh pada investasi secara tidak langsung melalui pengaruhnya pada tingkat bunga domestik.

4. Pengaruh Infrastruktur

Seperti di lakukan banyak negara di dunia, pemerintah mengundang investor guna berpartisipasi menanamkan modalnya di sektor-sektor infrastruktur, seperti jalan tol, sumber energi listrik, sumber daya air, pelabuhan, dan lain-lain. Pembangunan kembali infrastruktur tampaknya menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.

2.1.4. Upah Minimum

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena adanya pemenuhan kebutuhan yang layak (KHL) di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Upah minimum terdiri dari:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP), yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.
3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral disuatu provinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota.

Upah minimum juga dapat diartikan suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No.8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sektoral subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang low skilled. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, D, 1998).

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan/balas dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi

Upah yang diberikan untuk tenaga kerja tergantung kepada:

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya.
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (UMR).
3. Produktivitas marginal tenaga kerja.
4. Tekana yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha.
5. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah Riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Pembayaran kepada tenaga kerja dapat di bedakan kepada dua pengertian yaitu, gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji di artikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha / pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang di tetapkan dan di bayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja /atau buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” (Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2000, Bab 1, Pasal 1, Ayat 30).

2.1.5. Pengertian Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Angkatan Kerja

2.1.5.1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenaga kerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa dari usaha yang telah dilakukannya yakni upah. Maka pengertian permintaan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah (Boediono, 1992).

Sumber daya manusia (SDM) atau *Human Resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini sumber daya manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seseorang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok dalam usia kerja tersebut disebut tenaga kerja atau *Man power*.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja atau *Labor Force* dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah (2) golongan yang mengurus rumah tangga dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan lainnya (Payaman J. Simanjuntak, 2002).

Angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya dapat menghasilkan barang atau jasa atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan (Mulyadi Subri, 2003).

Menurut Badan Pusat Statistik (2003) yang di maksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, pegawai yang sedang cuti dan sejenisnya. Di samping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari atau mengharap pekerjaan juga termasuk dalam angkatan kerja. Adapaun Konsep/Penjelasan teknis tentang Tenaga Kerja, sebagai berikut:

1. **Penduduk usia kerja** adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
2. **Penduduk yang termasuk angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. **Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja** adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
4. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak di bayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

5. **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

2.1.5.2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja yaitu keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk pencari kerja. Kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja.

Menurut (Tulus T.H Tambunan, 2001), kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Menurut Payaman J. Simanjuntak (2002) elastisitas kesempatan kerja diartikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi. Elastisitas tersebut dapat dinyatakan untuk seluruh perekonomian atau untuk masing-masing sektor atau subsektor.

Elastisitas kesempatan kerja ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$E = \frac{\Delta N/N}{\Delta Y/Y} \dots\dots\dots$$

Dimana:

E : Elastisitas Kesempatan Kerja

ΔN : jumlah pertambahan kesempatan kerja sektor ekonomi

N : total kesempatan kerja pada sektor ekonomi

ΔY : jumlah pertambahan produksi sektor ekonomi

Y : jumlah produksi sektor ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengertian kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Yang dimaksud lapangan kerja adalah bidang kegiatan dari usaha atau pekerja atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Menurut Soedarsono (1996), pengertian besarnya Kesempatan Kerja adalah kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), termasuk semua lapangan pekerjaan yang masih lowong. Kesempatan kerja dapat diukur dari jumlah orang yang bekerja pada suatu saat dari suatu kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta jika terjadi permintaan akan tenaga kerja di pasar kerja, dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan tenaga kerja.

2.1.5.3. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang aktif dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa serta mereka yang siap bekerja dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Angkatan Kerja (labour force) di definisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Banyak sedikitnya jumlah angkatan kerja tergantung komposisi jumlah penduduknya. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk golongan usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula. Angkatan kerja yang

banyak tersebut diharapkan akan mampu memacu meningkatkan kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi lain tentang angkatan kerja menyebutkan bahwa, angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sebenarnya terlibat dalam kegiatan yang produktif, yaitu yang menghasilkan barang dan jasa, termasuk mereka yang berusaha untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu masih ada arti lain yang menyebutkan bahwa setiap orang yang masih mampu menghasilkan barang atau jasa merupakan angkatan kerja meskipun telah melewati batas usia yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi baik pemerintah maupun swasta dan termasuk usia pensiun. Pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu struktur umur penduduk dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja dalam suatu negara atau suatu daerah sewaktu-waktu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja. Perbandingan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dalam usia kerja ini disebut tingkat partisipasi kerja (Mulyani,2010) Lalu kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lainnya yang menerima pendapatan. Sewaktu-waktu ketiga golongan tersebut dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Maka dari itu kelompok ini disebut sebagai angkatan kerja potensial. Selain kelompok di atas masih ada yang disebut dengan pengangguran. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi disuatu negara sebenarnya tidak perlu menjadi masalah bila daya dukung ekonomi yang efektif di negara itu cukup kuat memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan kesempatan kerja.

2.1.6. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh

pencari kerja (Todaro, 2000). Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002). Penduduk yang berkerja terserap dan tersebar di berbagai sektor, namun tiap sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda demikian juga tiap sektor berbeda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut mengakibatkan dua hal, yaitu: a. Terdapat perbedaan laju peningkatan produktifitas kerja masing-masing sektor. b. Secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pendapatan nasional.

2.1.6.1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja di definisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja di turunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau masukan (faktor produksi) ke dalam output atau keluaran. Hukum permintaan tenaga kerja pada hakekatnya adalah semakin rendah upah tenaga kerja maka semakin banyak permintaan tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta besar, maka pengusaha akan mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor, yang di antaranya adalah besarnya jumlah angkatan kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja, upah dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut.

2.1.6.2. Indikator Penyerapan Tenaga Kerja

Adapun indikator dari penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1) Perubahan Upah Minimum Upah minimum yang berubah-ubah setiap tahunnya dapat mempengaruhi terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena apabila tingkat upah naik maka perusahaan akan lebih memilih untuk tidak menambah jumlah tenaga kerja lalu menaikkan upah kepada pekerja yang sudah ada.

2) Laju Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Banyaknya peluang atau penyerapan tenaga kerja diantara dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB di suatu provinsi. Apabila tingkat PDRB meningkat maka semakin banyak juga tenaga kerja yang terserap. Karena kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari seberapa besar pertumbuhan perekonomian di suatu daerah atau provinsi.

3) Laju Pertumbuhan Investasi Menurut (Tambunan, 2001) investasi merupakan suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena adanya kegiatan produksi maka terjadi penyerapan tenaga kerja yang cukup meningkat dan pendapatan masyarakat pun dapat meningkat yang selanjutnya dapat menciptakan serta meningkatkan permintaan pasar. Pendapat tersebut menjelaskan tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh investasi, dimana munculnya investasi akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan peningkatan terhadap pendapatan.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja diantaranya:

1. Rezza Aldila (2011), dalam studinya yang “Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Output Terhadap Indeks Ketimpangan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur di Wilayah Jawa Tengah”, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah.

Variable independen yang digunakan meliputi Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja (X1), sedangkan variable dependen adalah indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah (Y). Sampel yang diambil sejumlah 35 Kabupaten/Kota dengan metode *probability sampling* dengan menggunakan teknik *sensus sampling*. Alat analisisnya meliputi uji asumsi klasik yaitu multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi, serta analisis regresi berganda yang meliputi uji *goodness of fit* yakni koefisien determinasi, uji signifikansi simultan (uji statistik F) uji signifikansi parameter individual (uji t). Berdasarkan pengujian di dapatkan hasil bahwa semua variable yang digunakan memenuhi kriteria pengujian yang digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil variable pangsa penyerapan tenaga kerja industri manufaktur dan output berpengaruh positif dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0,00 dan 0,017. Koefisien determinasinya (*adjust R₂*) sebesar 0,998. Artinya 99,8 persen indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh ketiga variable. Sedangkan 0,2 persen lainnya dijelaskan diluar model.

2. Nur Fadilah (2012), dalam studinya berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri dan Investasi (studi kasus di sentra industri di Tegal). Hasil penelitian menunjukkan pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai t hitung sebesar -0,717 yang lebih kecil dari t table sebesar 1,671 dengan signifikansi sebesar $0,476 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti upah memiliki pengaruh negative dan tidak signifikansi terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil pengujian pengaruh produktivitas terhadap penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai t hitung sebesar -8,148 yang lebih besar dari t table sebesar 1,671 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti bahwa produktivitas memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja hasil pengujian pengaruh modal kerja terhadap penyerapan tenaga kerja diperoleh nilai t hitung sebesar 13,698 yang lebih besar dari t table sebesar 1,671 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$), hal ini berarti bahwa modal kerja memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai F hitung sebesar 128,454 yang lebih besar dari F table sebesar 2,76 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti upah, produktivitas dan modal kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

3. Nelsen Diyan Pratama (2012), dalam studinya yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil di Kabupaten Jepara”. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis pertumbuhan tenaga kerja pada industri kecil di Kabupaten Jepara. Variabel Dependennya yaitu penyerapan tenaga kerja dan variable Independennya yaitu investasi, usia usaha dan jenis industri.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda $Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$. Dimana: Y = Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada industry, a = Konstanta, X1 = Penerimaan, X2 = Tipe/jenis industri, X3 = Tingkat pendidikan pengusaha, X4 = Modal, X5 = Usia usaha industri kecil, β_1 - β_5 = Koefisien, e = Error term regresi. Variabel penerimaan kredit mempunyai hubungan tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Variabel jenis industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Variabel pendidikan pengusaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Variabel usia usaha berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Antara Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Secara umum pertumbuhan unit usaha dalam suatu industri besar dan sedang dalam suatu daerah akan menambahkan jumlah lapangan pekerjaan, penambahan

jumlah lapangan pekerjaan tersebut akan menambahkan penyerapan tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja yang tertampung akan bertambah.

Menurut Tri Wahyu Rejekiningsih (2004), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif. Sehingga dari penjelasan teori dan pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja, maka dapat disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : H_0 : jumlah unit usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah tahun 2014 – 2018. H_1 : jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah tahun 2014- 2018.

2.2.2. Hubungan Antara Nilai Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Hubungan antara investasi dengan kesempatan kerja menurut Harrod Domar (Mulyadi, 2002:8), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Perekonomian selalu berusaha mencapai kondisi optimal, maka penambahan penggunaan kapital melalui kegiatan investasi, yang berarti meningkatnya kapasitas produksi tersebut, akan meningkat pula penggunaan tenaga kerja, yang selanjutnya secara bersama-sama meningkatkan tingkat output maksimum yang mungkin di capai. Semakin besar penggunaan kapital, akan semakin besar pula pertumbuhan investasi yang signifikan, jika pola pertumbuhan ekonomi terus seperti ini tanpa

adanya kontribusi yang berarti dari investasi, dapat di pastikan pertumbuhan tersebut tidak dapat berlanjut terus (Tambunan, 2000).

Pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia, kecuali apabila jabatan-jabatan yang diperlukan belum dapat diisi dengan tenaga bangsa Indonesia. Dengan hal demikian dapat digunakan tenaga ahli warga Negara asing dan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penggunaan tenaga kerja warga Negara asing penduduk Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah. Perusahaan-perusahaan baik nasional maupun asing wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan bila dipandang perlu oleh pemerintah.

Dengan adanya peningkatan investasi pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang ada dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Matz, 2003).

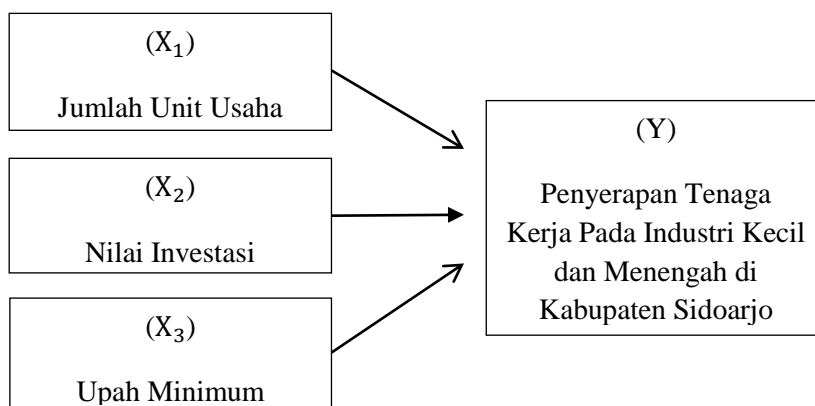
2.2.3. Hubungan Antara Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah juga mempunyai pengaruh terhadap tenaga kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negative terhadap kesempatan kerja.

Teori upah efisiensi (*efficiency-wage*) yang menyatakan upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Perusahaan-perusahaan beroperasi secara lebih efisien jika upah berada di atas titik keseimbangan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan lebih diuntungkan jika mempertahankan upah tinggi meskipun terdapat surplus tenaga kerja. Teori upah efisiensi menyatakan, pertama upah mempengaruhi kesehatan, kedua menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja. Semakin tinggi upah yang diberikan, semakin kecil kemungkinan para pekerjanya untuk memilih keluar. Ketiga, menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya dan keempat menyatakan upah tinggi memperbaiki upaya pekerja. Upah yang tinggi membuat pekerja lebih sigap dalam mempertahankan pekerjaan mereka.

Pada umumnya, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan disamping dengan cara meminimalkan biaya juga mengoptimalkan input produksi. Dimana kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relative lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harganya relative lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

2.3. Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah.

Dari penjelasan diatas dalam penelitian ini diambil hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga variable jumlah unit usaha berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo.
2. Diduga variable nilai investasi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Sidoarjo.
3. Diduga variable Upah Minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kabupaten Sidoarjo.